

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Serapan Anggaran di Bawah 50 Persen
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.6
Edisi	: Jumat, 5 Oktober 2018

Serapan Anggaran
di Bawah 50 Persen

D. HARDJAKUSUMA, (GM).-

Penyerapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi hingga triwulan III masih di bawah 50 persen dari yang ditargetkan sebesar 80 persen. Pembebasan lahan kerap menjadi penyebab tidak memuaskannya realisasi serapan anggaran di Kota Cimahi.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Maria Fitriana mengatakan, angka serapan anggaran tersebut belum termasuk laporan yang belum dimasukkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi.

“Realisasi serapan fisiknya baru 49,68 persen. Ini ada yang belum dilaporkan,” kata Pipit sapaan akrab Maria Fitriana saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jln. Demang Hardjakusumah, Kamis (4/10).

Sekarang, Pemkot Cimahi tinggal memiliki waktu sekitar dua bulan lebih untuk penyerapan anggaran. Jika melihat progres, pihaknya optimistis capaian serapan anggaran bisa menyentuh 80 persen. Salah satu faktor tidak terealisasi serapan anggaran fisik, kata Pipit, yakni lambat proses pembebasan lahan. Tahun ini, Pemkot Cimahi direncanakan melakukan pembebasan lahan di lima lokasi. Pertama, menyiapkan lahan pengganti Lapangan Krida. Anggaran yang disiapkan dari kas daerah mencapai Rp 19 miliar.

Kemudian, rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Leuwigajah dan penanggulangan banjir di Kelurahan Melong. Anggarannya mencapai Rp 65 miliar.

Selain itu, ada Rp 1,1 miliar yang sudah disiapkan untuk pengadaan tanah untuk pembuatan jalan. Serta Rp 50 juta untuk pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Cipageran.

Rencana pembebasan lahan kelima lokasi yang dominan berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) itu cukup berpengaruh banyak dalam capaian realisasi.

“Sekarang di DPKP, misalnya ada untuk penanganan banjir Melong. Pembebasan tanah yang sampai ini belum bisa dipastikan apakah bisa direalisasikan atau tidak,” ujarnya.

Pipit menjelaskan, sulitnya merealisasikan serapan anggaran dari pembebasan lahan dikarenakan gejolak harga di lapangan. Permasalahan utamanya ialah perbedaan antara harga appraisal dengan harga yang ditawarkan pemilik tanah.

Sebab, sambung Pipit, dalam proses pembebasan tanah, terkadang ada perubahan harga saat awal penawaran hingga proses pembelian. Pihaknya sendiri mengakui tidak bisa begitu saja mengikuti harga pemilik, karena harus sesuai appraisal yang sudah disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan sebagainya.

“Pemerintah nggak bisa membeli di luar harga appraisal karena bagaimanapun juga itu yang jadi patokan,” terangnya.

Untuk mengatasi permasalahan klasik atau yang kerap terjadi hampir tiap tahun itu, lanjut Pipit, pihaknya tengah mencari formula yang tepat. Diantaranya dengan lebih mempelajari NJOP dan mendiskusikannya dengan pihak lain. “Sedang kita cari pemecahannya. Kita harapkan masyarakat memahami kondisi ini, artinya memberikan harga yang memang sesuai,” pungkasnya.

(B.110)**